

PRESS BRIEF

Diskusi Publik INDEF

“Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo”

Jakarta, 20 Oktober 2026 — Diskusi publik INDEF bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo” mengulas capaian dan tantangan perekonomian selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5%, kualitas perkembangan perekonomian dinilai belum cukup berkualitas untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Diskusi ini mengulas bahwa capaian angka seperti pertumbuhan, rekor investasi, dan *lifting* minyak tidak serta-merta berbanding lurus dengan perbaikan daya beli, dan lapangan kerja formal, sehingga perlu dicermati lebih jauh melalui indikator-indikator yang tidak kalah pentingnya, seperti tekanan daya beli yang mendorong masyarakat menggunakan tabungan, industri manufaktur yang tertekan secara struktural, beban subsidi energi dan pembiayaan utang yang mempersempit ruang fiskal, serta menurunnya sentimen publik terhadap program-program utama pemerintah.

Esther Sri Astuti – Direktur Eksekutif INDEF, dalam sambutan pembukanya menyoroti bahwa rapor pemerintahan Prabowo-Gibran masih banyak berwarna merah. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5% dari tahun 2024 hingga 2026, dan kualitasnya pun belum memadai. Pertumbuhan tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari daya beli yang turun secara nyata, jumlah kelas menengah yang terus menyusut dari tahun ke tahun, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tutupnya sejumlah industri.

Esther menjelaskan bahwa lebih dari 50% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Mereka tidak dapat menikmati jaminan pensiun dan kesehatan seperti pekerja di sektor formal. Di sisi lain, pertumbuhan investasi belum cukup untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Dari sisi fiskal, Esther mencatat bahwa pajak menyumbang sekitar 80% penerimaan negara, dan sekitar 65% belanja negara ditopang oleh pajak. Namun, rasio pajak (*tax ratio*) cenderung turun dari tahun ke tahun. Menurutnya, upaya yang diperlukan tidak cukup hanya meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha tetap bertahan dan mampu membayar pajak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Jika pekerja sektor informal semakin banyak, potensi penerimaan pajak akan ikut berkurang.

Abdul Manap Pulungan – Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, menyoroti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, terutama pada triwulan I 2026 sebesar

5,61% (yoy), belum tentu diikuti oleh membaiknya daya beli. Masyarakat masih tertekan oleh pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Inflasi *volatile food* pada Maret 2026 tercatat 5,03% (yoy), meski sudah turun dari periode sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan upah riil cenderung stagnan bahkan lebih rendah inflasi. DPK perseorangan tumbuh tidak lebih dari 5%, yang menandakan masyarakat makan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pulungan juga mencatat tekanan di sektor keuangan dan fiskal. Turunnya IHSG mencerminkan melemahnya kepercayaan pasar, sementara rupiah terus melemah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS pada Oktober 2026. Dari sisi fiskal, yield SBN yang mencapai 7,15% menunjukkan beratnya beban pembiayaan. Pemerintah cenderung mengandalkan penerbitan SBN untuk membiayai belanja negara, sehingga pembayaran bunga utang perlu diperhatikan agar fiskal tetap berkelanjutan. Porsi belanja cicilan bunga utang telah menyedot hampir 1/5 dari belanja pemerintah pusat.

Menurut Pulungan, kualitas pertumbuhan juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan dan kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja belum optimal, dan pengangguran pada lulusan D-IV hingga S-3 justru meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum tentu menjamin pekerjaan dan pendapatan yang memadai bahkan tidak terserap pasar kerja. Di sisi lain, tingkat kemiskinan memang turun dari 8,47% pada Maret 2025 menjadi 8,25% pada September 2025 dan 8,07% pada Maret 2026, tetapi masih di atas target pemerintah 2026 sebesar 6,5–7,5%. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dinilai bukan hanya dari output, tetapi juga dari dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Annisa Utami K – Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, memaparkan bahwa ketergantungan impor energi membuat beban fiskal semakin berat. Pada 2025, target *lifting* minyak memang tercapai untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Namun, sebagian besar pasokan minyak masih berasal dari impor karena kebutuhan tumbuh lebih cepat dari produksi, dan ketergantungan ini juga terjadi pada BBM, terutama bensin. Akibatnya, Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, yang selama ini bergerak jauh di atas asumsi APBN. Menurutnya, asumsi yang terlalu rendah membuat beban subsidi tampak lebih kecil dibanding kenyataan di lapangan. Hal ini terlihat dari realisasi subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026, tertinggi dalam lima tahun.

Annisa juga menegaskan bahwa subsidi energi belum tepat sasaran karena masih melekat pada barang, bukan pada orang. Subsidi mengikuti pola konsumsi, sehingga siapa pun yang membeli ikut menikmatinya tanpa melihat tingkat pendapatan. Akibatnya, sebagian besar subsidi listrik dan bensin justru dinikmati oleh kelas menengah dan calon kelas menengah, sementara kelompok bawah menerima porsi yang lebih kecil. Ia merekomendasikan agar desain subsidi disesuaikan dengan tujuannya. Dengan kata lain, jika subsidi dimaksudkan untuk melindungi masyarakat rentan, maka sasarannya harus individu.

Dari sisi kelistrikan dan transisi energi, Annisa menilai keandalan listrik justru memburuk, dengan durasi padam yang semakin panjang dan kesenjangan yang lebar antara Jawa dan luar Jawa. Transisi ke EBT juga berjalan lambat. Capaian bauran EBT terlihat membaik karena targetnya direvisi turun dalam PP 40 Tahun 2025, bukan karena realisasinya meningkat. Prioritas anggaran pun masih timpang, karena subsidi energi fosil jauh melampaui anggaran untuk pengembangan EBT. Ia mendorong agar investasi kelistrikan diarahkan ke transmisi dan distribusi, serta subsidi energi fosil dikurangi secara bertahap.

Wahyu Tri Utomo – Data Scientist Continuum INDEF, memaparkan hasil analisis sentimen publik terhadap delapan program utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Data diambil dari X, TikTok, Instagram, dan YouTube, mencakup 635.114 komentar dan 17.336.003 *share* dan retweet, dengan akun yang terkategori sebagai akun tidak organik sudah dikeluarkan. Pada tahun pertama, sentimen positif tercatat 38,1% dan negatif 61,9%. Pada tahun kedua, sentimen positif turun sekitar 8,14%, dan 6 dari 8 program mengalami penurunan sentimen positif. Wahyu menilai ini sebagai pergeseran dari kekhawatiran menjadi kritik nyata tentang tata kelola dan pelaksanaan program.

Wahyu menjelaskan bahwa MBG tetap menjadi program yang paling banyak dibicarakan sekaligus paling banyak menuai sentimen negatif. Isu yang menonjol antara lain kasus keracunan, struktur pengurus BGN yang dinilai tidak tepat, korupsi, usulan agar MBG diganti dengan uang tunai, serta beban guru yang meningkat karena ikut mengurus MBG. Sementara itu, KDMP melonjak dari posisi kelima menjadi salah satu program yang paling menyita perhatian publik, dengan penurunan sentimen positif mencapai 38%. Isu yang muncul meliputi rekrutmen dan penempatan manajer yang jauh dari domisili, Latsar yang menimbulkan korban, lokasi koperasi yang janggal/tidak strategis, serta persaingan dengan ritel yang bisa mempengaruhi ekosistem ritel.

Di sisi lain, swasembada pangan, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis mendapat sentimen positif. Sekolah rakyat dipuji karena membuka akses pendidikan, sedangkan swasembada pangan dinilai positif karena capaiannya, meski kritik soal harga pangan yang masih mahal juga banyak muncul dengan *engagement* 5 kali lebih tinggi dari sentimen positifnya. Di luar delapan program, penanganan bencana karhutla mendapat sentimen hampir 95% negatif. Kritiknya tidak hanya soal keseriusan pemerintah, tetapi juga soal anggaran, khususnya pada fiskal yang sering disebut kuat oleh pemerintah, tetapi saat bencana terjadi anggaran seolah tidak tersedia atau sulit dialokasikan.

Ahmad Heri Firdaus – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment, menjelaskan bahwa industri manufaktur terus tertekan dari waktu ke waktu, apa pun kebijakan yang diterapkan pemerintah. Ini menandakan ada persoalan struktural yang belum terselesaikan. Pemulihan industri pun belum konsisten. Industri masih dibebani oleh mahalannya energi, ketergantungan pada bahan baku impor, lemahnya permintaan ekspor, dan derasnya

persaingan dengan produk impor di pasar domestik. Kebijakan perindustrian, perdagangan, dan perpajakan yang belum searah ikut menambah beban biaya produksi, sehingga produk dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor. Padahal, manufaktur seharusnya menjadi motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Heri juga menilai rekor realisasi investasi belum berdampak optimal terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja. Hilirisasi, misalnya, terlalu berfokus pada pembangunan fasilitas pengolahan. Akibatnya, ada risiko terbentuk kawasan industri yang menghasilkan ekspor bernilai tinggi tetapi keterkaitannya dengan pemasok lokal dan perekonomian domestik terbatas. Di saat yang sama, tekanan biaya mendorong perusahaan melakukan efisiensi, sehingga lapangan kerja formal menyusut dan pekerja bergeser ke sektor informal.

Menurut Heri, kesalahan mendasar dalam pembangunan industri terletak pada cara mengukur keberhasilannya. Selama ini keberhasilan masih dilihat dari besarnya investasi, nilai ekspor, atau jumlah fasilitas yang dibangun. Padahal, ukuran yang lebih penting adalah peningkatan produktivitas, pendalaman struktur industri, penciptaan lapangan kerja formal, dan daya saing. Ia merekomendasikan strategi industri yang lebih terintegrasi, evaluasi menyeluruh terhadap hilirisasi, harmonisasi kebijakan perdagangan, serta penguatan ekspor manufaktur, agar industri benar-benar terhubung dengan perekonomian domestik dan memberi manfaat yang lebih luas.

Narahubung: Sarwo Edi (+62 813-8047-7878)